



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Triwulan III 2024

BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT
DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Kami juga turut berterima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Kelautan dan Perikanan atas arahan dan bimbingan selama ini dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Pada tahun anggaran 2024, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja untuk Triwulan III tahun 2024 serta analisis dan rencana tindak lanjut untuk triwulan-triwulan berikutnya.

Dalam pengejawantahan kinerja 2024, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 Sasaran Kegiatan yang dikonkretkan ke dalam 17 butir Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2024 hasil proses *cascading* Indikator Kinerja Kegiatan Sekretaris Jenderal.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini kami sadari masih jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 17 Oktober 2024
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Ari Prabowo

ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Pendahuluan.....	1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	1
Isu Strategis.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
Kegiatan.....	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	6
IK 1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik.....	10
IK 2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik.....	13
IK 3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik.....	15
IK 4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan.....	16
IK 5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	18
IK 6 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti.....	21
IK 7 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	25
IK 8 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional.....	27
IK 9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan.....	32
IK 10 Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.....	34
IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.....	35
IK 12 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.....	36
IK 13 Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.....	37
IK 14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.....	38
IK 15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri...	39

IK 16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.....	40
IK 17 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Mendapatkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.....	41
BAB IV PENUTUP.....	42
Kesimpulan.....	42
Saran.....	42
LAMPIRAN.....	43
Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024.....	43
Penghargaan yang diterima Biro HKLN pada Triwulan III 2024.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro HKLN (dalam kotak kuning)	2
Gambar 2 <i>Screen capture</i> aplikasi kinerjaku Triwulan III 2024 untuk akun Biro HKLN	7
Gambar 3 <i>Screen capture</i> aplikasi kinerjaku untuk output kinerja Biro HKLN Triwulan III 2024	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Triwulan III tahun 2024	2
Tabel 2 Daftar IKU dan besar target Biro HKLN tahun 2024 dan Triwulan III 2024	5
Tabel 3 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan III 2024	6
Tabel 4 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik	10
Tabel 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	10
Tabel 6 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik	13
Tabel 7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	13
Tabel 8 Realisasi dan Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik	15
Tabel 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	15
Tabel 10 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II 2024	16
Tabel 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2022	16
Tabel 12 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	18
Tabel 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	18
Tabel 14 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan III 2024	21
Tabel 15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	21
Tabel 16 Persentase Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan III 2024	25
Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	25
Tabel 18 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	27
Tabel 19 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	27
Tabel 20 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	32
Tabel 21 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	32
Tabel 22 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III 2024	34
Tabel 23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	34
Tabel 24 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III 2024	35
Tabel 25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	35
Tabel 26 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III 2024	36

Tabel 27 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	36
Tabel 28 Realisasi dan Capaian IK Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan III 2024	37
Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	37
Tabel 30 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III 2024	38
Tabel 31 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	38
Tabel 32 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Triwulan III 2024	39
Tabel 33 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	39
Tabel 34 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	40
Tabel 35 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023	40
Tabel 36 Realisasi dan Capaian IKK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Triwulan III 2024	41
Tabel 37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tw III 2017 s.d. 2023	41

RINGKASAN EKSEKUTIF

Fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai koordinator dan fasilitator penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana dalam Peraturan tersebut turut diatur tata organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang proporsional, efektif, efisien dan berorientasi birokrasi kelas dunia.

Keberadaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki arti strategis karena secara timbal balik berperan sebagai komunikator dan pengelola hubungan baik secara horizontal yaitu antara unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *counterpart* dari negara asing mitra Indonesia dan organisasi kerja sama regional dan internasional, maupun secara vertikal dimana Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri berfungsi sebagai pen jembatan arus informasi dari Menteri kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan publik luas lebih serta menjadi *hub* informasi masyarakat melalui media sosial resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri merelasikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan rumusan jajaran pimpinannya kepada publik eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan baik di dalam dan di luar negeri serta kepada publik internal turut memiliki nilai strategis.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada Triwulan III tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dituangkan ke dalam 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. IKU yang realisasinya dapat diukur pada Triwulan III 2024 adalah sebanyak 8 (delapan) yaitu:

1. Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
2. Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti;
4. Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional;
6. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
7. Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar; dan
8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjajaku (www.kinerja.kkp.go.id), aplikasi resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perencanaan kinerja, pemantauan dan pelaporan hasilnya, skor kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi Biro HKLN triwulan III 2024 adalah 107,32. Mengacu kepada Pasal 21 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023

tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 107,32, Biro HKLN kembali memperoleh predikat baik.

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro HKLN) Triwulan III Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama Triwulan III tahun 2024 (tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024). Selain memuat pencapaian kinerja, Laporan Kinerja Biro HKLN Triwulan III Tahun 2024 juga memuat pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang telah digunakan. Penyusunan Laporan Kinerja Biro HKLN Triwulan III Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro HKLN dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja bermanfaat untuk digunakan sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun *progress* dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh unit kerja lingkup Biro HKLN dengan cara menyampaikan pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab unit setiap triwulan kepada pengelola kinerja Biro HKLN. Selanjutnya, pengelola kinerja melaporkan pencapaian kepada Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal KKP melalui sistem yaitu aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) secara online. Pembahasan atas realisasi dan capaian kinerja triwulanan dan tahunan juga dilakukan oleh dengan pimpinan unit kerja di Biro HKLN sembari berkoordinasi dan berkonsultasi dengan ketua dan anggota Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024.

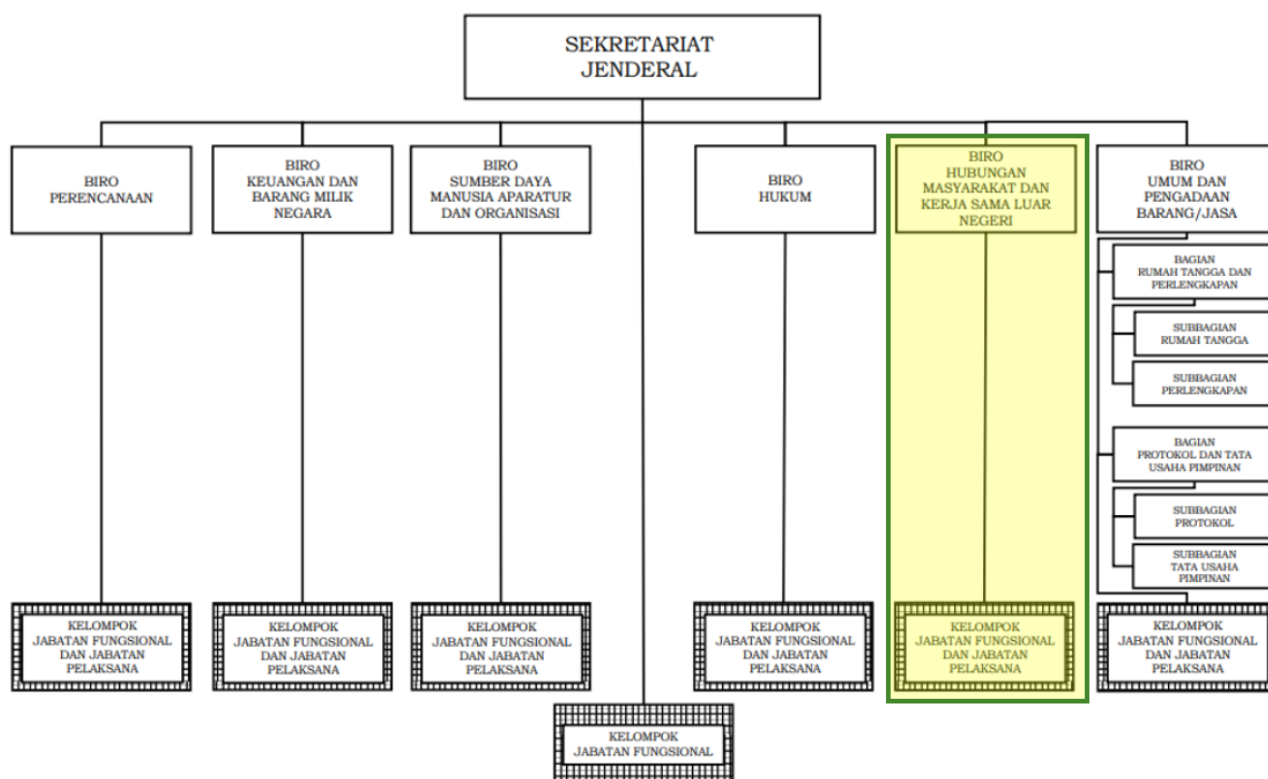
Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini yang dapat diidentifikasi setidaknya adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
- Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
- Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
- Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja untuk periode menengah dan Panjang; dan
- Sebagai dasar evaluasi dan penyusunan rencana kinerja triwulan dan atau tahun berikutnya.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Terhitung sejak tanggal 26 Februari 2024, struktur organisasi Biro HKLN berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Biro HKLN terdiri atas Kepala Biro HKLN dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Biro HKLN adalah untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberitaan dan opini publik;
- koordinasi fasilitasi dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- koordinasi pelaksanaan layanan informasi publik dan perpustakaan;
- koordinasi penelaahan, perumusan, penyusunan, analisis, pengharmonisasian, pelaksanaan,
- pemantauan, dan evaluasi kerja sama bilateral dan multilateral;
- koordinasi pelaksanaan layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- pelaksanaan urusan administrasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro HKLN (dalam kotak kuning)

Sumber Daya Manusia Biro HKLN pada Triwulan III tahun 2024 berjumlah 83 pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Jabatan/Tim Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kepala Biro HKLN	1
2	Pemberitaan dan Opini Publik	29
3	Layanan Informasi Publik	9
4	Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	10
5	Kerja Sama Bilateral	8
6	Kerja Sama Multilateral	9
7	Dukungan Manajerial	16
8	Diperbantukan/dipekerjakan	2
Jumlah		84

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Triwulan III tahun 2024

Sebagai unit kerja di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Jenderal KKP, Biro HKLN tidak memiliki Visi dan Misi tersendiri melainkan mengadopsi tugas, fungsi, visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP. Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

- penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas,
- pembinaan, dan
- pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP yang diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan visi dari Sekretariat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

“Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal KKP yang mempunyai peran penting sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP. Dalam mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, dapat didukung dengan misi Sekretariat Jenderal KKP adalah:

1. Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen, dan
2. Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa isu strategis (strategic issue) adalah permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi atau instansi pemerintah. Dengan demikian, Biro HKLN menetapkan bahwa isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Biro HKLN. Adapun isu strategis yang telah diidentifikasi sehingga menjadi fokus perhatian Biro HKLN pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) dalam sektor kelautan perikanan seperti pemberantasan IUU Fishing, dan peningkatan volume dan pangsa ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berbasis kepada Blue Economy;
2. Citra positif Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Pencapaian seluruh program prioritas KKP di tahun 2024 dan kontribusi yang dapat diberikan Biro HKLN; dan
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dan mental serta reformasi birokrasi KKP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan Biro HKLN (pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri yang efektif), sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri ditindaklanjuti secara efektif. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai diantaranya adalah 'Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan'. Dalam melaksanakan kegiatannya, Biro HKLN pada tahun anggaran 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 31.097.958.000 (tiga puluh satu milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Tahun 2024

Sasaran kegiatan merupakan kondisi ideal yang diharapkan diarahkan oleh Biro HKLN sebagai suatu hasil seluruh indikator yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan Biro HKLN. Untuk mencapai tujuan Biro HKLN Tahun 2024 maka sasaran kegiatan yang ditetapkan adalah:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional;
3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

Guna mencapai sasaran kegiatan di atas maka seluruh sasaran kegiatan tersebut diturunkan ke dalam bentuk IKU yang pengukurannya dapat dilakukan secara kuantitatif. Hal ini dapat menjadi ukuran keberhasilan dan pencapaian target kinerja dimana keseluruhannya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Kinerja dan butir-butir IKU merupakan instrumen pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sekaligus merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab/kinerja.

Detil IKU Biro HKLN tahun 2024 dan target IKK Triwulan III 2024 tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2024	Target Tw III
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9	-
		2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3	-
		3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94	-
		4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%	89%
		5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	88
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%	55%
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%	88%
		8	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%	55%
		9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%	30%
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	84	-
		11	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	-	-
		12	Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	-
		13	Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94%	94%
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	100%
		15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	-
		16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%	-
		17	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	75	-

Tabel 2 Daftar IKU dan besar target Biro HKLN tahun 2024 dan Triwulan III 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi dan Capaian Kinerja

Perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan serta pengumpulan data kinerja di lingkup Biro HKLN dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN dengan menggunakan aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id), aplikasi resmi pengelolaan kinerja di KKP yang dikelola Biro Perencanaan. Proses penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum pada manual IKK masing masing IKK yang telah ditetapkan Kepala Biro HKLN. Realisasi dan capaian kinerja Biro HKLN periode Triwulan III tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Gambar berikutnya adalah *screen capture* aplikasi kinerjaku per tanggal 11 Oktober 2024 dimana berdasarkan hasil penghitungan oleh aplikasi, Nilai Kinerja Biro HKLN Triwulan III tahun 2024 adalah 107,32.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9	-	-	-
		2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3	-	-	-
		3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94	-	-	-
		4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%	89%	97,42%	109,46%
		5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	88	89,39	101,58%
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%	55%	82,35%	120%
		7 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%	55%	51,42%	93,49%
		8 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%	88%	90%	102,27%
		9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%	30%	33,33%	111,10%
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	84	-	-	-
		11 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	85	80	81,68	102,10%
		12 Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	-	-	-
		13 Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94%	94%	133%	120%
		14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	100%	100%	100%
		15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	-	-	-
		16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%	-	-	-
		17 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	75	-	-	-

Tabel 3 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan III 2024



NKO September - 2024

Download

Unit Kerja : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI

Skor Kinerja : 107.32

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung➕

Kode	Besaran/Indikator Kinerja	Seluan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target September	Capaian September	%	Target s/d September	Capaian s/d September	%	Tgl Input
SK.01	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum						105,52			105,52		
IKSK.01	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	96,90	0,00			0,00	0,00		09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.02	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,30	0,00			0,00	0,00		09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.03	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	0,00			0,00	0,00		09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.04	Persentase efektivitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	89,00	89,00	97,42	109,46	89,00	97,42	109,46	09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.05	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Dukung1 ✓	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	89,39	101,38	88,00	89,39	101,38	09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
SK.02	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Kerja Sama Internasional						106,44			106,44		
IKSK.06	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditandatangani Data Dukung1 ✓	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	55,00	82,35	120,00	55,00	82,35	120,00	09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.07	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Dukung1 ✓	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	90,00	102,27	88,00	90,00	102,27	09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.08	Persentase partisipasi/komendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Data Dukung1 ✓	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,00	55,00	51,42	93,48	55,00	51,42	93,48	09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.09	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	30,00	33,00	110,00	30,00	33,00	110,00	09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
SK.03	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri						110,00			110,00		
IKSK.10	Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,00	0,00			0,00	0,00		09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.12	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.13	Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Data Dukung1 ✓	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	94,00	133,33	120,00	94,00	133,33	120,00	09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1 ✓	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	0,00			0,00	0,00		09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
IKSK.17	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berspredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		09-Oct-2024 10:11
	Tambah Data Dukung➕											
Tutup												

Gambar 2 *Screen capture* aplikasi kinerjajaku Triwulan III 2024 untuk akun Biro HKLN



Gambar 3 *Screen capture* aplikasi kinerjajaku untuk output kinerja Biro HKLN Triwulan III 2024

Metode analisis mengacu kepada rekomendasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 dengan Triwulan III tahun 2023;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024);
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada) merupakan penjelasan apabila terdapat pemeringkatan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Penilai posisi/peringkat KKP secara nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: berisi tentang penyebab keberhasilan ketercapaian/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target Indikator Kinerja selama Triwulan III tahun 2024;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: Penggunaan sumber daya baik anggaran dan SDM serta sumber daya lainnya antara lain melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi/kolaboratif program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja baik antar unit kerja/Kementerian/Lembaga maupun instansi dan lembaga terkait;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berisikan tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian; dan

8. Untuk Indikator Kinerja yang bersifat tahunan, tetap dijelaskan dalam Laporan Kinerja dengan menyampaikan progres kegiatan pendukung yang telah dilakukan di Triwulan III dengan dilengkapi dokumentasi serta kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja.
9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 memberikan arahan Laporan Kinerja untuk menyediakan sub bab yang isinya menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Oleh karena pada tahun 2024 salah satu Indikator Kinerja yang diamanatkan kepada Biro HKLN adalah 'Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri' dimana substansi laporan untuk IKU setiap triwulan pasti memuat uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, maka dalam rangka efisiensi serta demi menghindarkan *redundancy* informasi, dalam Laporan Kinerja ini tidak tersedia sub bab tersendiri membahas realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IK 1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	n.a.	n.a.	Belum

Tabel 4 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Indikator Kinerja baru di tahun 2024 dimana pada Triwulan III 2024 tidak ditetapkan besar target untuk IKK ini. Sumber informasi besar Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Besar Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik dihitung dan diolah berdasarkan data yang dikumpulkan sepanjang tahun 2023 dan diumumkan pada tahun 2024.

Berdasarkan dokumen rencana aksi pencapaian target Perjanjian Kinerja Biro HKLN tahun 2024, kegiatan pendukung Biro HKLN yang dilaksanakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Indeks PIKP KKP terdiri dari:

- Pengelolaan layanan produksi; dan
- Publikasi produksi video documenter.

Sepanjang triwulan III tahun 2024, dalam rangka pengelolaan layanan produksi telah dilaksanakan kegiatan seperti:

- monitoring media sosial dengan 72.513 data di twitter, 2.315 data di instagram, 1.131 data di facebook, 177 data di tiktok, dan 2.722 data di youtube;
- monitoring media massa dengan 21.430 pemberitaan di media online, 1.428 pemberitaan di media cetak, dan 132 pemberitaan di media tv;
- 8 kali konferensi pers dengan topik Update Perkembangan Kasus Penyelundupan Benih Bening Lobster, Kinerja KKP Semester 1 Sekretariat Jenderal, Kinerja KKP Semester 1 DJPT, DJPB, PDSPKP, Kinerja KKP Semester 1 PKRL dan BPPMHKP, Kinerja pengawasan SDKP Semester 1 , Update Kasus Tuduhan Dumping Udang di Amerika Serikat, Update Penindakan Penyelundupan Lobster, Update Penegakan Hukum Untuk Pulau Pulau Kecil dan Terluar.
- 3 kali Bincang Bahari dengan topik Lulusan Vokasi KKP Unggul Langsung Terjun Di Dunia Kerja Pasca Wisuda, Beecamp: Ciptakan Wirausaha Baru KP, Apa itu susu ikan;
- 115 siaran pers;
- Produksi 2 episode podcast
- Produksi 3 edisi KKP News
- Publikasi konten di media sosial KKP, meliputi:
 - Instagram, 214 konten
 - Tiktok, 31 konten
 - Twitter, 139 konten
 - Facebook, 176 konten

Youtube: 25 buah Video, 31 Live Video, 39 buah Short Video

- i. Penyusunan 3 bahan investigasi isu, meliputi pencemaran lingkungan dari tambak budi daya di Karimunjawa, Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut di Morodemak, dan Profiling Rusdianto Samawa terkait Pemberitaan Negatif dan Narasi “Tangkap Menteri Trenggono” di media rml.
- j. Penyusunan 6 strategi komunikasi Kebijakan dan Isu sektor kelautan dan perikanan, meliputi: Modeling Budi Daya Rumput Laut, Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia, Satelit Cakupan Nusantara, Tahun Tuna, Asian-Pacific Aquaculture 2024, dan Update Kebijakan Pengelolaan Lobster.

Terkait dengan publikasi produksi video dokumenter, telah dilaksanakan 5 video yaitu:

- a. Distribusi Perikanan Berkereta
- b. Harapan di Bawah Laut Kapoposang
- c. Srikandi dari Seriwe
- d. Tuna Sirip Kuning dari Tanah Papua
- e. Kalamo di Timur Indonesia

Selama pelaksanaan kegiatan di atas terdapat permasalahan seperti:

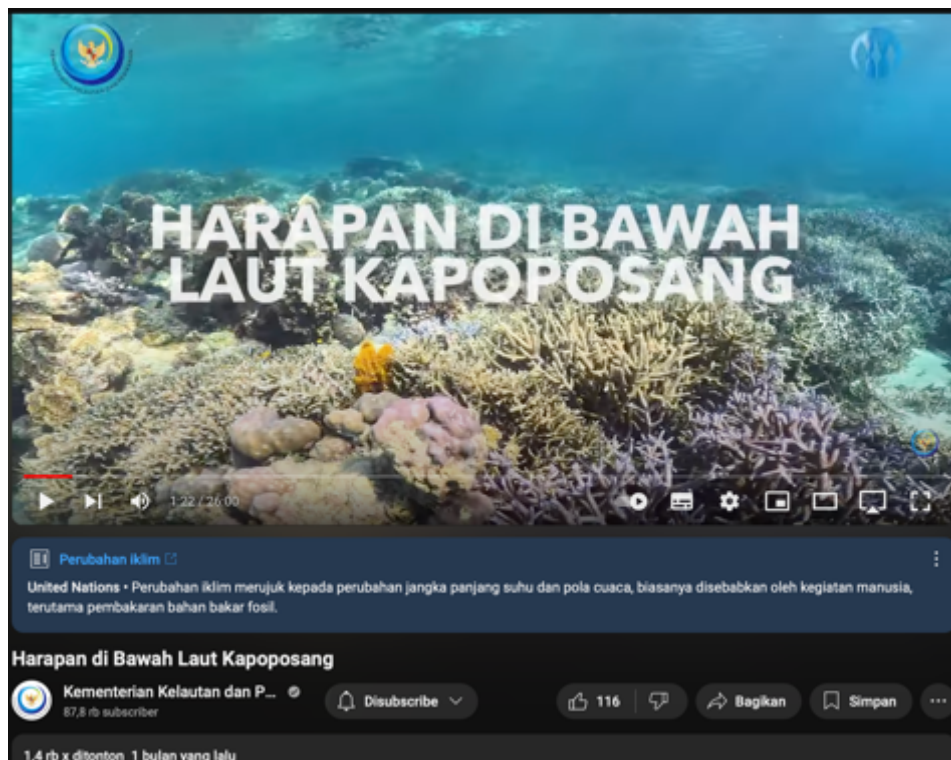
- a. Untuk produksi podcast, terdapat kendala dalam penjadwalan waktu taping podcast dengan narasumber, sehingga terdapat sejumlah materi podcast yang belum diproduksi;
- b. Untuk produksi video dokumenter, tim cukup mengalami hambatan dari lamanya proses negosiasi tim pengadaan barang/jasa dengan vendor atau media sebagai penyedia jasa;
- c. Untuk penyusunan strategi komunikasi maupun investigasi isu, tim mengalami hambatan dalam mengumpulkan informasi awal dari Eselon 1 terkait, lamanya mendapat respon maupun menunggu konfirmasi data terkait;

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Tim Kerja Pemberitaan dan Opini Publik Hubungan Masyarakat, telah langkah-langkah dan solusi untuk mengatasi masalah di atas anatai lain:

- a. Untuk hambatan yang dialami saat produksi video dokumenter, Tim melakukan follow up secara berkala terkait proses negosiasi dan penyelesaian e-catalog dari tim pengadaan barang/jasa;
- b. Untuk hambatan yang dialami dalam penyusunan strategi komunikasi maupun investigasi isu, Tim melakukan follow up kepada Eselon 1 terkait, dan menambah sumber informasi seperti dari pihak eksternal (Dinas Kelautan dan Perikanan terkait); dan
- c. Melalui koordinasi dan kerja sama yang intensif dan membangun koordinasi dan komunikasi dan menginvestigasi permasalahan yang ada sehingga semua hal dapat diselesaikan. Adapun bahan informasi dimaksud dapat dilihat melalui tautan sebagai berikut: yang tertarik untuk strategi komunikasi adalah https://drive.google.com/drive/folders/1XmN_7qzLp6XCuUhUnCNbHTIz6ojXDbj9?usp=share_link dan investigasi isu yaitu https://drive.google.com/drive/folders/1sODogBMLQtyjkiW0GSaO-IQR00YrSy8O?usp=share_link.

Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik baru menjadi IK Biro HKLN di tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap hasil IK serupa di tahun 2023 dan di tahun-tahun sebelumnya. Juga, tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik triwulan III 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana

Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024). Hingga akhir triwulan III 2024 tidak ada data resmi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya baik berupa anggaran maupun sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan terkait Indikator Kinerja ini.



IK 2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	n.a.	n.a.	Belum

Tabel 6 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Indikator Kinerja baru di tahun 2024 dimana pada Triwulan III 2024 tidak ditetapkan besar target untuk IKK ini. Sumber informasi besar nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Besaran nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik dihitung dan diolah oleh Kementerian Kominfo berdasarkan data yang dikumpulkan (diantaranya dari seluruh oleh Kementerian dan Lembaga) oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2023 dan diumumkan pada tahun 2024.

Berdasarkan dokumen rencana aksi pencapaian target Perjanjian Kinerja Biro HKLN tahun 2024, kegiatan pendukung Biro HKLN yang dilaksanakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Indeks PIKP KKP terdiri dari:

- Pengelolaan layanan produksi; dan
- Publikasi produksi video documenter.

Sepanjang triwulan III tahun 2024, dalam rangka pengelolaan layanan produksi telah dilaksanakan kegiatan seperti:

- monitoring media sosial dengan 72.513 data di twitter/X, 2.315 data di instagram, 1.131 data di facebook, 177 data di tiktok, dan 2.722 data di youtube;
- monitoring media massa dengan 21.430 pemberitaan di media online, 1.428 pemberitaan di media cetak, dan 132 pemberitaan di media tv;
- 8 kali konferensi pers dengan topik Update Perkembangan Kasus Penyelundupan Benih Bening Lobster, Kinerja KKP Semester 1 Sekretariat Jenderal, Kinerja KKP Semester 1 DJPT, DJPB, PDSPKP, Kinerja KKP Semester 1 PKRL dan BPPMHKP, Kinerja pengawasan SDKP Semester 1 , Update Kasus Tuduhan Dumping Udang di Amerika Serikat, Update Penindakan Penyelundupan Lobster, Update Penegakan Hukum Untuk Pulau Pulau Kecil dan Terluar.
- 3 kali Bincang Bahari dengan topik Lulusan Vokasi KKP Unggul Langsung Terjun Di Dunia Kerja Pasca Wisuda, Beecamp: Ciptakan Wirausaha Baru KP, Apa itu susu ikan;
- 115 siaran pers;
- Produksi 2 episode podcast
- Produksi 3 edisi KKP News
- Publikasi konten di media sosial KKP, meliputi: Instagram 214 konten, Tiktok 31 konten, Twitter 139 konten, Facebook 176 konten, Youtube 25 buah Video dan 31 Live Video serta 39 buah Short Video

- i. Penyusunan 3 bahan investigasi isu, meliputi pencemaran lingkungan dari tambak budi daya di Karimunjawa, Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut di Morodemak, dan Profiling Rusdianto Samawa terkait berita negatif dan narasi “Tangkap Menteri Trenggono” di media rmol.
- j. Penyusunan 6 strategi komunikasi Kebijakan dan Isu sektor kelautan dan perikanan, meliputi: Modeling Budi Daya Rumput Laut, Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia, Satelit Cakupan Nusantara, Tahun Tuna, Asian-Pasific Aquaculture 2024, dan Update Kebijakan Pengelolaan Lobster.

Terkait dengan publikasi produksi video dokumenter, telah dilaksanakan 5 video yaitu:

- a. Distribusi Perikanan Berkereta
- b. Harapan di Bawah Laut Kapoposang
- c. Srikandi dari Seriwe
- d. Tuna Sirip Kuning dari Tanah Papua
- e. Kalamo di Timur Indonesia

Selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas terdapat masalah seperti:

- a. Untuk produksi podcast, terdapat kendala dalam penjadwalan waktu taping podcast dengan narasumber, sehingga terdapat sejumlah materi podcast yang belum diproduksi; dan
- b. Untuk produksi video dokumenter, tim cukup mengalami hambatan dari lamanya proses negosiasi tim pengadaan barang/jasa dengan vendor atau media sebagai penyedia jasa;

Pemimpin dan jajaran anak buah yang bergerak di bidang kehumasan di Biro HKLN adalah para profesional andal, berpengalaman Panjang dan teruji daya tahan, loyalitas dan dedikasinya maka sangat mudah untuk bagi Biro HKLN merumuskan dan menerapkan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai solusi jitu atasi masalah di atas yaitu:

- a. Untuk hambatan yang dialami saat produksi video dokumenter, Tim melakukan follow up secara berkala terkait proses negosiasi dan penyelesaian e-catalog dari tim pengadaan barang/jasa;
- b. Untuk hambatan yang dialami dalam penyusunan strategi komunikasi maupun investigasi isu, Tim melakukan follow up kepada Eselon 1 terkait, dan menambah sumber informasi seperti dari pihak eksternal (Dinas Kelautan dan Perikanan terkait); dan

Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik baru menjadi IK Biro HKLN di tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap hasil IK serupa di tahun 2023 dan di tahun-tahun sebelumnya. Juga, tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik triwulan III 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024). Perlu ditekankan bahwa tidak diketahui telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya baik berupa anggaran maupun sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan terkait IKU ini.

IK 3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	82	n.a.	n.a.

Tabel 8 Realisasi dan Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan III tahun 2024, belum ada, baik realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Jadwal atau periode penghitungan IKK bersifat tahunan. Demikian juga dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, belum ada hasil penghitungan IK ini. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk IK ini. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang menjadi acuan Biro HKLN sebagai pembandingan. Tidak ada informasi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai).

IK 4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
89%	97,42%	109,46%	80%	89,51%	111,89%	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 10 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	80%	93,84%

Tabel 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2022

Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan mulai dikenalkan oleh Biro HKLN pada triwulan III 2023. Pada triwulan III tahun 2024, realisasi IK ini sebesar 97,42% dan oleh karena target IK adalah 89% maka capaiannya menjadi $(97,42\% / 89\%) \times 100\% = 109,46\%$. Besar realisasi dan capaian Indikator Kinerja ini di triwulan III 2024 dibandingkan dengan triwulan III 2023 masing-masing mengalami sedikit penurunan namun diyakini secara statistik tidak signifikan sehingga tidak perlu ditakuti.

Persentase Efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah angka atau besaran persentase efektifitas yang nilainya diperoleh melalui pengisian kuisioner oleh stakeholder di akhir Triwulan III 2024 setelah dilakukan penyebaran dan pengumpulan kuisioner secara online (menggunakan aplikasi google forms survey) untuk layanan hubungan lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) seperti kegiatan kunjungan-kunjungan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Manual IK telah menentukan efektifitas layanan hubungan lembaga yaitu dengan mengacu kepada matriks di bawah ini.

% Efektifitas Layanan	Kinerja Layanan
25,00 - 64,99	Tidak Efektif
65,00 - 76,60	Kurang Efektif
76,61 - 88,30	Efektif
88,31 - 100,00	Sangat Efektif

Maka berdasarkan matriks di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah sangat efektif karena persentase efektifitas berada dalam rentang antara 88,31% sampai dengan 100%. Data dukung berisi hasil survey dan berkas berisi hasil survey yang telah diolah datanya untuk mendapatkan realisasi persentase efektifitas di atas dapat dilihat dalam tautan https://drive.google.com/drive/folders/1B1HDJSgyKQ0bqjJk5wOJtIbYrFdxVyx?usp=share_link.

Dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum

teruat besar target akhir periode menengah untuk Indikator Kinerja ini. Sejauh ini, belum pernah ditemukan terdapat acuan tingkat nasional apalagi internasional untuk Indikator Kinerja ini.

Indikator keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target Indikator Kinerja ini antara lain:

Keberhasilan Archipelago Indonesia Marine Library hingga Triwulan III 2024 telah memiliki beberapa antara lain adalah: (1) koleksi yang relevan lebih dari 8000-an judul, informasi yang aktual dan akurat, (2) tenaga yang berkualitas dan profesional, (3) sistem pelayanan yang cepat dan tepat dengan aplikasi SLiM, serta (4) didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai berupa internet (Wifi) yang terkoneksi dengan cepat.

Sebagai perpustakaan Pembina di lingkup KKP, perpustakaan telah mengirimkan penilaian kepada pengguna jasa dengan kuesioner online terkait dengan pelayanan yang dilakukan. Archipelago selama ini menciptakan suasana yang nyaman bagi para pustakawan untuk peningkatan dan penguatan literasi, belajar sambil rekreasi, dan hal ini menjadi inspirasi para penggunanya bahkan Kementerian Lembaga banyak yang melakukan studi banding, bahkan lingkup satker banyak mempergunakan ruang audio visual sebagai tempat rapat.

Kecepatan Layanan perpustakaan Archipelago merupakan salah andalan kegiatan utama yang dilakukan dengan baik dan langsung maupun tidak langsung terhadap pengguna jasa perpustakaan. Layanan perpustakaan umum diberikan kepada masyarakat umum berupa kunjungan dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA maupun Universitas bahkan tamu-tamu Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan tempat transit sambil menunggu mereka meluangkan waktu untuk membaca koleksi yang dimiliki oleh Archipelago. Dengan sarana dan prasarana yang ada memberikan kepuasan kepada para pengunjung yang berasal dari berbagai lapisan dan tingkatan masyarakat baik akademisi maupun tamu kementerian.

Beberapa testimoni dari responden survey/kuisisioner yang bersifat konstruktif untuk kinerja layanan hubungan lembaga selama triwulan III 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil dari penyebaran kuisisioner sepanjang Triwulan III 2024, terdapat 55 responden yang terdiri dari 27 orang pria dan 28 orang wanita. Ke 55 responden tersebut menerima layanan yang jenisnya diantaranya adalah:

Oleh karena itu, realisasi nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP pada Triwulan III 2024 adalah 89,39. Dengan target pada Triwulan III sebesar 88 maka capaian IKK ini adalah: $\text{Capaian} = (\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\% = (89,39 / 88) \times 100\% = 101,58\%$

Mengacu kepada tabel penentuan mutu pelayanan dan kinerja yang disediakan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka kinerja Perpustakaan KKP adalah 'Sangat Baik' karena besar Nilai Indeks SKM x 25 adalah 89,39 dan masuk ke dalam kisaran 88,31 – 100.

Beberapa opini apresiatif yang diperoleh dari para responden survey yang dapat dijadikan saran atau masukan diantaranya adalah:

- Bagus;
- Gantungan kuncinya bisa lebih bagus;
- Tidak ada saran atau masukan semuanya sudah cukup bagus;
- Luar biasa;
- Mantap, jaya terus perpustakaan KKP;
- Sangat Baik, tidak ada;
- Sangat Baik;
- Semoga dapat lebih ditingkatkan lagi;
- Tempat yang bagus, sangat nyaman;
- Semoga lebih bisa menerapkan kondisi yang sunyi;

- Sudah bagus, tingkatkan lagi!! ; dan
- Semoga buku novelnya tambah banyaaaak.

Hingga akhir Triwulan III tahun 2024, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target Indikator Kinerja ini kendati tidak ada kolaborasi yang spesifik dengan pihak eksternal Biro HKLN.

IK 5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
88	89,39	101,58%	80	88,50	110,6%3	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 12 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	80	88,50

Tabel 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai diintroduksi Biro HKLN pada triwulan II tahun 2023. Kepuasan layanan dilakukan melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner (secara online). Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tabel di atas, dapat kita lihat kalau realisasi Indikator Kinerja pada triwulan III 2024 sebesar 89,39 sehingga capaiannya menjadi 101,58% karena target Indikator Kinerja adalah 88, artinya realisasi pada triwulan III 2024 memenuhi target. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan III tahun 2023 maka terjadi kenaikan dari 88,50 menjadi 89,39. Namun pada besar capaian terjadi penurunan karena target telah berubah dimana di tahun 2023 hanya sebesar 80 sedangkan di tahun 2024 naik menjadi 88.

Dalam pengukuran Skala Likert, nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" yang dilekatkan kepada setiap unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Bobot nilai tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah unsur

Diketahui jumlah bobot = 1 sedangkan jumlah unsur = 9 (jumlah unsur yang dikaji berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Ke-9 unsur survey pelayanan Perpustakaan KKP disampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia?
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajiban biaya/tarif dalam pelayanan?
5. Apakah produk hasil layanan perpustakaan yang Saudara terima telah sesuai dengan standar pelayanan?
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku Pustakawan dalam memberikan pelayanan?

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana perpustakaan?
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan? (email, media sosial perpustakaan)

Bobot nilai tertimbang ditentukan oleh Perpustakaan tidak berbeda antar unsur atau merata sehingga bobot nilai tertimbang semua unsur = $1/9 = 0,11$. Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = (\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SKM} = \text{SKM} \times 25$$

Penentuan mutu pelayanan dan kinerja Perpustakaan KKP mengacu kepada tabel di bawah ini yang disediakan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil dari penyebaran kuisioner sepanjang Triwulan III 2024, terdapat 20 responden yang berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 6 orang pria dan 14 orang wanita. Ke 20 responden tersebut menerima layanan yang jenisnya adalah:

- Layanan keanggotaan;
- Layanan bimbingan pemustaka;
- Layanan fasilitasi ISBN (International Standard Book Number) dan ISSN (International Standard Serial Number);
- Layanan penelusuran informasi;
- Layanan sirkulasi; dan
- Layanan pemanfaatan ruangan perpustakaan/baca di tempat.

Tabulasi hasil pengolahan survey yang dilakukan Perpustakaan tabel dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

	Unsur								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah	190	192	192	212	194	195	198	189	208
Rata-rata	3,45	3,49	3,49	3,85	3,53	3,55	3,60	3,44	3,78
Bobot	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
Rata rata x bobot	0,38	0,39	0,39	0,43	0,39	0,39	0,40	0,38	0,42
Nilai indeks IKM	3,58								

Nilai indeks IKM x 25	89,39								
Target	88%								
Capaian	101,58%								

Oleh karena itu, realisasi nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP pada Triwulan III 2024 adalah 89,39.

Dengan target pada Triwulan III sebesar 88 maka capaian indikator kinerja ini adalah:

$$\text{Capaian} = (\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\% = (89,39 / 88) \times 100\% = 101,58\%$$

Mengacu kepada tabel penentuan mutu pelayanan dan kinerja yang disediakan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka kinerja Perpustakaan KKP adalah 'Sangat Baik' karena besar Nilai Indeks SKM x 25 adalah 89,39 dan masuk ke dalam kisaran 88,31 – 100.

Raw data hasil survey dan hasil pengolahan data yang terkumpul dari survey kepuasan pelayanan Perpustakaan KKP pada Triwulan III 2024 dapat dilihat dalam tautan https://drive.google.com/drive/folders/1Bx1vISimFkIQK_UkhG-V8EF0plpGW13N?usp=share_link. Pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk Indikator Kinerja ini. Sejauh ini, belum pernah ditemukan terdapat acuan tingkat nasional apalagi internasional untuk Indikator Kinerja ini.

Hingga akhir Triwulan III tahun 2024, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IKK ini kendati tidak ada kolaborasi tertentu dengan pihak eksternal Biro HKLN.

IK 6 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
55%	82,35%	120%	70%	96%	120%	n.a.	n.a.	Belum

Tabel 14 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan III 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	70 %	96%

Tabel 15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti merupakan Indikator Kinerja yang baru diintroduksi Biro HKLN pada tahun 2023 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Adapun besar target Indikator Kinerja ini di triwulan III 2024 sebesar 55%.

Berdasarkan isi kedua tabel di atas, bisa kita ketahui kalau realisasi Indikator Kinerja ini pada periode triwulan III 2024 adalah 82,35%. Sementara itu besar target yang ditetapkan untuk triwulan III 2024 untuk Indikator Kinerja ini adalah 55% sehingga capaian Indikator Kinerja menjadi 120% (berdasarkan proses penghitungan oleh aplikasi kinerjaku). Jika dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja yang sama di tahun 2023, maka terjadi penurunan yaitu dari 96% ke 82,35%.

Pada tahun 2024, terdapat 17 dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang akan ditindaklanjuti. Adapun nama dari 17 dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. MoU Development of Blue Economy Through Marine Affairs and Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Tanzania);
2. Memorandum of Understanding between The Ministry of Agriculture and Rural Development of The Socialist Republic of Viet Nam and The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries of The Republic Of Indonesia on Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Vietnam);
3. Agreement on Mutual Recognition of Certification of Fishing Vessel Personnel between Govt. Indonesia and the Govt of Spain (kerja sama dengan negara Spanyol);
4. Letter of Intent on the Bilateral Maritime Dialogue (BMD) RI-Prancis serta Joint Statement on Developing Indonesia-France Marine and Fisheries Cooperation Programme (kerja sama dengan negara Perancis);
5. Mutual Recognition Agreement (MRA) on Quality of Fish and Fishery Products yang ditandatangani di Bergen pada tanggal 1 Oktober 2022 (kerja sama dengan negara Norwegia);
6. Perjanjian kerja sama Ocean for Development Programme antara KKP dan NORAD (kerja sama dengan North American Aerospace Defense Command (NORAD) dari negara Amerika Serikan dan Kanada);

7. Plan of Action for the Implementation of Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Climate Change and Environment of The United Arab Emirates (kerja sama dengan negara Persatuan Emirat Arab)
8. MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Arab Saudi (kerja sama dengan negara Arab Saudi);
9. Extension of the MoU on Maritime Cooperation between The Govt of RI and the Govt of the USA (kerja sama dengan negara Amerika Serikat);
10. MoU on Economic Cooperation and Capacity Building Between the EFTA States and Indonesia (kerja sama dengan European Free Trade Association dari negara Islandia, Liechtenstein, Norwegia and Swiss);
11. the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, as regards matters related to readmission (kerja sama dengan negara Uni Eropa);
12. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation (kerja sama dengan negara Rusia);
13. Letter Of Intent Between The Fish Quarantine And Inspection Agency Of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Of The Republic Of Indonesia And The National Fisheries Products Quality Management Service Of The Ministry Of Oceans And Fisheries Of The Republic Of Korea On The Development Of Sanitary And Phyto-Sanitary Electronic Certification (Sps E-Certification) System For Fish And Fishery Products (kerja sama dengan negara Korea Selatan);
14. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Natural Resources of The People's Republic of China on Marine Cooperation (kerja sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok);
15. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Agriculture and Rural Affairs of The People's Republic of China on Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok)
16. Implementing Arrangement for The Establishment of a Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Center between The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of The Republic of Indonesia and The Ministry of Oceans and Fisheries of The Republic of Korea (kerja sama dengan negara Korea Selatan);
17. Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia in respect of The Common Guidelines concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia (kerja sama dengan negara Malaysia);

Hingga akhir triwulan III 2024, dari 17 dokumen kerja sama di atas 14 diantaranya telah mendapat tindak lanjut oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri baik secara langsung atau secara koordinatif. Bentuk kegiatan tindak lanjut kerja sama di atas sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan tindak lanjut MoU on Development of Blue Economy through Marine Affairs and Fisheries Cooperation RI-Tanzania, 6 Februari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 1);
2. Partisipasi KKP pada kegiatan "Meet Indonesia" yang digagas oleh KBRI Hanoi, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 2);

3. Kunjungan kerja dalam rangka implementasi MRA ke Spanyol, 28 Januari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 3);
4. Bilateral Meeting Dialogue ke 2 di Paris, Perancis, 14 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 4);
5. Pembahasan Kuesioner Survei Neraca Aset Moneter, arus ke ekonomi dan arus ke lingkungan dalam kerangka Ocean for Development Program, 19 Juni 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 6);
6. Rapat Pembahasan Implementasi Plan of Action for the Implementation MoU on Marine and Fisheries Cooperation antara Pemerintah Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, 22 Februari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 7);
7. Rapat pembahasan usulan amandemen MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Arab Saudi (tindak lanjut kerja sama nomor 8);
8. Courtesy Meeting Menteri Kelautan dan Perikanan dan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Administrator, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 9);
9. Rapat Rencana Training Program on International Fish Trade, Global Applicable Framework and Market Access, 4 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 10);
10. Rapat Persiapan Pertemuan Intersesi Working Group Trade and Sustainable Development (WG TSD) Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) Isu Keanekaragaman Hayati, 7 Februari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 11);
11. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Indonesia-Rusia Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) Co-Chairs Meeting dan Russia Halal Expo 2024, 26 April 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 12);
12. Rapat Persiapan Pembahasan TCG Permintaan Tanggapan Tentang Peraturan/Perundang-Undangan Di Indonesia, 10 Agustus 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 15);
13. Pembahasan Indikator Monitoring dan Rencana Monitoring Sosial Ekonomi Rig to Reef, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 16); dan
14. Rapat Persiapan Kegiatan Pemberian Pemahaman Nelayan untuk Tidak Menangkap Ikan di Perairan Negara Lain Tanpa Izin di Provinsi Sumatera Utara, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 17)

Oleh karena itu, berdasarkan formula berikut:

$$\%KS \text{ Bilateral} = (\text{Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti} / \text{Jumlah dokumen KS yang aktif}) \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti adalah dokumen yang merupakan hasil tindak lanjut dokumen kerja sama bilateral yang aktif.
- Jumlah dokumen kerja sama yang aktif adalah dokumen kerja sama bilateral yang masih berlaku dan direncanakan akan ditindaklanjuti pada tahun 2024.

maka realisasi indikator kinerja 'Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti' hingga akhir triwulan III 2024 adalah:

$$\text{realisasi \% KS Bilateral} = (14 / 17) \times 100\% = 82,35\%$$

Target indikator kinerja ini pada triwulan III 2024 adalah 55% maka capaian adalah:

$(\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\% = (82,35\% / 55\%) \times 100\% = 120,00\%$ (berdasarkan aplikasi)

Sebagai keterangan, berdasarkan penghitungan aplikasi kinerja, nilai capaian yang lebih besar daripada 120% otomatis dihitung menjadi 120%. Dokumen yang berisi informasi yang lebih lengkap seperti daftar dan jadwal kegiatan tindak lanjut kerja sama bilateral sepanjang triwulan III 2024 dan tautan data dukung dokumen tindak lanjut dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WgqoPZeHGVRr3JhXw4Tl4lLaqLRBNeH9edlyfyw7J0w/edit?gid=1761306033#gid=1761306033> pada sheet 'IK Bilateral'.

Realisasi IK ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dirasa belum tepat oleh karena realisasi dan capaian baru sampai dengan akhir triwulan III 2024. Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan perbandingan.

IK 7 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
88%	90%	102,27%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 16 Persentase Kepuasan terhadap layanan pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan III 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan III tahun 2024, telah tersedia besar realisasi dan capaian Biro HKLN untuk IK Indeks Kepuasan terhadap layanan pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP. Hal ini dikarenakan penghitungan IK di tahun 2024 bersifat triwulanan. Akan tetapi pada triwulan yang sama di tahun 2023, belum ada hasil penghitungan IKK ini karena Indikator Kinerja ini baru ada di tahun 2023 dan di tahun 2023 frekuensi penghitungannya masih bersifat tahunan.

Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP adalah angka atau besaran dalam satuan persen yang dideduksi dari kepuasan para *stakeholder*/pengguna jasa layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP yang disediakan oleh Biro HKLN sepanjang triwulan III 2024. Untuk mengetahui persentase kepuasan, Biro HKLN melakukan penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara online pada triwulan III 2024 memakai aplikasi google forms survey.

Daftar pertanyaan yang disampaikan dalam kuisisioner adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
2. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
8. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana? dan
9. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Hasil pengolahan atas persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa realisasi Indikator Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP untuk periode triwulan III 2024 adalah sebesar 90%. Hasil ini diperoleh dari 5 orang responden yang mengisi dan melakukan *submit*

kuisisioner secara *online*. Oleh karena target Indikator Kinerja ini di triwulan III 2024 sebesar 88% maka capaian Indikator Kinerja ini sebesar:

$$\text{Capaian} = (\text{realisasi} / \text{Target}) \times 100\% = (90\% / 88\%) \times 100\% = 102,27\%$$

Kuisisioner juga menghimpun umpan balik dari para responden dalam bentuk masukan guna perbaikan dan apresiasi layanan perjalanan dinas luar negeri oleh Biro HKLN. Beberapa respon dari responden diantaranya:

- respect untuk para narahubung dan petugas PDLN
- diperlukan adanya integrasi data antara SIMPEL (Setneg) dengan AEPSILON (Kemlu)
- lebih ditingkatkan kembali layanan PDLN untuk KKP
- Semoga dapat tepat waktu penyelesaian proses administrasi PDLN

Apabila mengacu kepada tabel di bawah ini yang diambil dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka dengan realisasi sebesar 90%, mutu pelayanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP pada periode triwulan III 2024 adalah sangat baik atau berkinerja sangat baik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Data mentah dan hasil pengolahan terhadap survey kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP dapat dilihat dalam tautan https://drive.google.com/drive/folders/1qpXTZbwjRqjwgkQIDFlx2RgkWaL3RLK2?usp=share_link.

Berdasarkan peraturan terkait yang berlaku, belum tersedia target tahun terakhir pada rencana strategis untuk IKK ini. Pada tataran nasional apalagi internasional, tidak tersedia standar yang dapat dijadikan acuan oleh Biro HKLN sebagai pembanding.

IK 8 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
55%	51,42%	93,49%	66,67%	95,23%	95,23%	n.a.	n.a.	Belum

Tabel 18 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50%	36,36%

Tabel 19 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Persentase Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2023 hasil pengembangan Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Besar target Indikator Kinerja ini di triwulan III 2024 adalah 55%.

Realisasi kegiatan kerja sama luar negeri ruang lingkup regional dan multilateral oleh Biro HKLN sepanjang triwulan III 2024 adalah sebagai berikut:

Daftar rencana kegiatan forum internasional kerja sama ASEAN, Intrakawasan dan PBB sepanjang tahun 2024 dimana posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan akan diajukan ke dalam forum tersebut dengan tujuan untuk diterima adalah sebagai berikut:

Kerja sama Regional (KSR)

1. Pertemuan ASWGF ke-32
2. Pertemuan ASEAN Fisheries Consultative Forum ke-16
3. Pertemuan ASEAN Joint Committee on Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme ke-31 (30th ASEAN JCM),
4. SEAFDEC SCM ke-56
5. SEAFDEC PCM ke-47
6. FCG/ASSP ke-27
7. BIMP-EAGA (WG on Fisheries) ke-11
8. The 28th Regular Session of Indian Ocean Tuna Commission
9. The 31st Annual Meeting of CCSBT
10. Working Group on Agriculture and Agro-based Industry Meeting IMT-GT ke-17
11. The 21st Regular Session of the WCPFC
12. Penyusunan ASEAN Guidelines on the Placement and Protection of Migrant Fishers
13. RPOA IUU CCM

Berdasarkan, hasil yang dihimpun dari profesional/pejabat fungsional pengampu kegiatan/pekerjaan KSR dalam tim kerja Kerja Sama Multilateral Biro HKLN, hingga akhir September 2024, terdapat 7 kegiatan forum internasional yang telah dihadiri delegasi dari Biro HKLN / Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada forum tersebut disampaikan

posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan. Ke-7 kegiatan tersebut adalah:

1. SEAFDEC SCM ke-56 (KSR), 6 Mei 2024;
2. The 28th Regular Session of Indian Ocean Tuna Commission (KSR), 13 Mei 2024;
3. Pertemuan ASWGF ke-32 di Kuala Lumpur, Malaysia" dimana disampaikan dokumen deliverable Indonesia: Common Understanding and Initiative on small scale aquaculture dan Regional Strategy to encourage the implementation of FAO FG on small scale fisheries dan kertas posisi (KSR), triwulan III 2024, tautan: <https://drive.google.com/drive/folders/1-Syk0yfWdZkDbv7wb50rqf6E1Iz3yr7R> ;
4. Pertemuan ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ke-16 di Kuala Lumpur, Malaysia (dilaksanakan sebelum ASWGF pada triwulan III 2024) dimana dalam forum turut disampaikan Kertas Posisi RI (KSR), tautan : <https://drive.google.com/drive/folders/1yYNGHR1u3CwxIV-B3VghcogRdKNB4C9a> ;
5. Pertemuan ASEAN Joint Committee on Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme ke-31 (30th ASEAN JCM) pada triwulan III 2024. Forum tahunan ASEAN ini secara spesifik membahas mengenai komoditas-komoditas utama perdagangan ASEAN dalam working group seperti seaweed dan tuna. KKP menjadi lead country untuk ASEAN Tuna Working Group (KSR), tautan: <https://drive.google.com/drive/folders/1aGYQy2vC3K-SsGNwbqMwSwoD-MCMjPJS> ;
6. Working Group on Agriculture and Agro-based Industry Meeting IMT-GT ke-17, diselenggarakan pada triwulan ke-3 tahun 2024 (KSR); dan
7. Penyusunan dan pengesahan ASEAN Guidelines on the Placement and Protection of Migrant Fishers, terselenggara pada triwulan III tahun 2024 (KSR).

Kerja Sama Intrakawasan (KSI)

1. Kertas Posisi untuk update komitmen lama pada OOC-9
2. Posisi/Presentasi dalam rangka Pertemuan APEC OFWG ke-22
3. Pedoman Delri/Kerpos SGOM ATSEA-2
4. Proyek APEC OFWG 101 2024A - Promoting Decision Support System (DSS) in the APEC Region
5. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum IORA WGBE
6. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum G-20 CESWG Brazilia 2024
7. Kertas Posisi untuk usulan komitmen baru pada OOC-9
8. RSC 6 ATSEA-2
9. Pedoman Delri/Kerpos MM ATSEA-2
10. Pedoman Delri/Kerpos Pre-SOM/SOM ke-19
11. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen IORA guideline IUUF
12. Pedoman Delri/Kerpos Perundingan Perjanjian Subsidi Perikanan

Berdasarkan, hasil yang dihimpun dari profesional/pejabat fungsional pengampu kegiatan/pekerjaan KSI dalam tim kerja Kerja Sama Multilateral Biro HKLN, hingga akhir September 2024, terdapat 6 kegiatan forum internasional yang telah dihadiri delegasi dari Biro HKLN / Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada forum tersebut disampaikan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan. Ke-6 kegiatan tersebut adalah:

1. Kertas Posisi untuk update komitmen lama pada OOC-9 (KSI), 12 Januari 2024, tautan <https://drive.google.com/drive/folders/1kDnoudaefD7RpWdROeTk3xVlaXuJl7cL> ;
2. Posisi/Presentasi dalam rangka Pertemuan APEC OFWG ke-22 (KSI), 22 Februari 2024 tautan: <https://drive.google.com/drive/folders/1kDnoudaefD7RpWdROeTk3xVlaXuJl7cL> ;
3. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum G-20 CESWG Brazilia 2024 (KSI), 29 Januari 2024, tautan: <https://drive.google.com/file/d/13ezVJEUVEpCqSttMcnPjLaF473YH3l8f/view> ;
4. Kertas Posisi untuk usulan komitmen baru pada OOC-9 (KSI), 7 Maret 2024, tautan: <https://drive.google.com/drive/folders/1kDnoudaefD7RpWdROeTk3xVlaXuJl7cL> ;
5. Posisi/Presentasi dalam rangka Pertemuan APEC OFWG ke-23, diubah menjadi -> Diterimanya Usulan Proyek KKP oleh APEC, Proyek yang diusulkan KKP di APEC Project Session I Tahun 2024, telah dinyatakan diterima dan dapat dibiayai oleh APEC (KSI), April 2024, tautan <https://drive.google.com/drive/folders/1kDnoudaefD7RpWdROeTk3xVlaXuJl7cL> ;
6. Tersusunnya bahan/dokumen IORA guideline IUUF (KSI), 2 Mei 2024 (tautan: https://drive.google.com/file/d/1rebTtfyznRtnZJN0OpE7oyOSBD1Tn_Ei/view);

Dokumen KSI lainnya seperti:

- Tersusunnya pedoman Delri/Kertas Posisi untuk Pedoman SGOM ATSEA-2 (KSI) (tautan data dukung: https://docs.google.com/document/d/1tNDa_vzbpnDjRp1h2kpCjzxwJlJLeBRL/edit);
- Penyampaian Concept Notes pada Proyek APEC Session I OFWG 101 2024A - Promoting Decision Support System (DSS) Using Digital Data to Support Small Pelagic Fisheries Management in the APEC Region (KSI), 18 Maret 2024 (tautan data dukung: <https://drive.google.com/drive/folders/1Jk38DOWZGMC3cKkFdctoc5gJgO-Z1uYI>)

Kerjasama PBB (KSPBB)

1. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum 1st Session of the Sub-Committee on Fisheries Management
2. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Joint FAO-IMO-ILO ad hoc Working Group on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Related Matters
3. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Eleventh Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD- 11) di Bangkok, Thailand
4. Sidkom 80
5. Regional Ocean Dialogue
6. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum 36th FAO COFI
7. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum COP 29 UNFCCC
8. CITES 33rd Animals Committee Meeting
9. SOM AIS
10. Dokumen Proposal Project GEF 8 disampaikan kepada GEF

Berdasarkan, hasil yang dihimpun dari profesional/pejabat fungsional pengampu kegiatan/pekerjaan KSPBB dalam tim kerja Kerja Sama Multilateral Biro HKLN, hingga akhir September 2024, terdapat 5 kegiatan forum internasional yang telah dihadiri delegasi dari Biro HKLN /Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada forum tersebut disampaikan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan. Ke-5 kegiatan tersebut adalah:

1. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum 1st Session of the Sub-Committee on Fisheries Management (KSPBB), 15 Januari 2024, tautan: <https://drive.google.com/file/d/1uta3Wn78THT-O3BqQ60LoXjBeqVj62Ue/view?usp=sharing> ;
2. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Joint FAO-IMO-ILO ad hoc Working Group on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Related Matters (KSPBB), 8 Januari 2024, tautan: https://drive.google.com/file/d/1ZGxy5R5PMULaTyBgZIM0cQvZj90aUm_/view?usp=sharing ;
3. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Eleventh Asia- Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD-11) di Bangkok, Thailand (KSPBB), 20 Februari 2024, tautan: <https://drive.google.com/file/d/1Da0CDdgYuTTUEHTx2obmT-vD-ARMVIRY/view?usp=sharing> ;
4. Tersusunnya pedoman Delri untuk Sidkom 80 (KSPBB), 22 April 2024, tautan: <https://drive.google.com/file/d/1Xor3iifSlqEaFZE2vydiKFwjoMBr1BF0/view?usp=sharing> ;
5. Regional Ocean Dialogue. Pada Sidang Komisi UN ESCAP ke-79 tahun 2023, Indonesia telah berhasil mendorong diadopsinya Resolusi 79/2 tentang Kerja Sama Regional untuk Mempercepat Aksi Perubahan Iklim terkait Laut di Asia dan Pasifik untuk Pembangunan Berkelanjutan, oleh karena itu Indonesia bersama co-sponsors Fiji dan Maladewa menyelenggarakan Regional Dialogue on Ocean-based Climate Action (OBICA) pada tanggal 19 September 2024 di Kantor Pusat UN ESCAP, Bangkok (KSPBB), tautan: <https://drive.google.com/file/d/1QWm6wkUGaOlrdVIIWoIYJhtaL8fEmqXU/view?usp=sharing> .

Berdasarkan hasil yang dihimpun dari pimpinan dan staf tim kerja kerja sama regional dan multilateral Biro HKLN, hingga akhir September 2024, terdapat $7 + 6 + 5 = 18$ kegiatan forum internasional yang telah dihadiri delegasi dari Biro HKLN / Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada forum tersebut disampaikan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan manual indikator kinerja, realisasi indikator kinerja pada triwulan III 2024 dihitung sebagai berikut

Realisasi %KS Regional dan Multilateral =

(Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional /Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa yang diusulkan) x 100%

Maka, realisasi pada triwulan III 2024 = $(18 / 35) \times 100\% = 51,42\%$

Target IKU di Triwulan III 2024= 55%

Capaian = $(\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% = (51,42\% / 55\%) \times 100\% = 93,49\%$

Data dukung serta informasi lain terkait dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional triwulan III 2024 dapat diakses melalui tautan

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WgqoPZeHGVRr3Jhwx4Tl4lLaqLRBNeH9edlyfw7J0w/edit?gid=993020150#gid=993020150> pada *sheet* 'IK Posisi Rekomendasi'.

Berdasarkan hasil penghitungan dan penjelasan di atas, realisasi Indikator Kinerja ini tidak memenuhi target sehingga besar capaian tidak sama dengan atau lebih besar daripada 100%. Besar target ini sebagaimana lazimnya ditetapkan sejak periode triwulan I sampai dengan periode triwulan IV tahun 2024. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian untuk IK yang sama di periode triwulan III 2023.

Akan tetapi, Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/KepSJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk Indikator Kinerja ini. Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan perbandingan.

IK 9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
30%	33,33%	111,10%	8%	8,33%	104,13%	n.a.	n.a.	Belum

Tabel 20 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8%	8,33%

Tabel 21 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN sejak triwulan III 2023 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu ‘Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama’. Tidak ada ditetapkan besar target untuk IK untuk tahun-tahun sebelum atau periode triwulan sebelum triwulan III tahun 2023.

Pada tanggal 14-15 Mei 2024 bertempat di Pulau Bali, Indonesia, telah diselenggarakan ASEAN-Australia Indo-Pacific Workshop on the Use of Technology for Sustainable Aquaculture. Kegiatan dalam kerangka Kerja Sama Regional ini berawal dari inisiasi Kementerian Luar Negeri sebagai implementasi konkret dari ASEAN Outlook on the Indo Pacific, dengan dukungan Pemerintah Australia. CN telah disahkan di AMAF. Tentu saja dalam kesempatan ini Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berkesempatan mengambil peran sebagai pemimpin dalam forum workshop internasional.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, dengan agenda hari pertama difokuskan untuk *full class activity*, sedangkan hari kedua adalah praktik lapangan dalam bentuk *field trip* ke lokasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau lokasi lain yang terkait dengan perikanan (terkait dengan isu Digitalisasi Teknologi Perikanan) dilengkapi dengan aktivitas *lunch* dan *cultural performance* serta *excursion*.

Target peserta kegiatan ini adalah pemangku kepentingan di sektor perikanan budidaya di ASEAN. Kementerian Luar Negeri mengidentifikasi bahwa diperkirakan ada kegiatan KKP yang mengundang peserta dari negara ASEAN yang dapat disinergikan dengan workshop ASEAN-Australia. Peserta dari negara-negara Forum Pasifik diberikan pembiayaan dari Australia, sedangkan peserta ASEAN dengan pembiayaan masing-masing. Kegiatan dibiayai sebagian besar oleh Pemerintah Australia dengan *co-sharing* dari pemerintah Republik Indonesia (Kemlu dan KKP) yang diharapkan mendukung untuk pembiayaan seperti paket meeting, field trip, jamuan makan, rapat persiapan, souvenir, transportasi lokal, dan perjalanan tim pelaksana dari Biro HKLN.

Selanjutnya, untuk triwulan III tahun 2024, tidak ada kegiatan pertemuan dalam kerangka kerja sama regional dan multilateral dalam bidang atau sektor kelautan dan perikanan selain di atas dimana delegasi dari KKP menjadi pemimpinnya, atau dengan kata lain jumlah

pertemuan/pencalonan di dalam periode ini adalah 1 (satu) hasil akumulasi dari awal tahun atau dari triwulan I tahun 2024.

Berdasarkan manual indikator kinerja, maka realisasi indikator kinerja pada triwulan III 2024 dihitung sebagai berikut

Realisasi % kepemimpinan Indonesia di forum regional dan multilateral bidang KP =

% Kepemimpinan = (Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia) + (Jumlah pertemuan/pencalonan di luar rencana) / Rencana jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia x 100%

Maka, realisasi pada triwulan III 2024 = $((1) + (0) / 3) \times 100\% = (1/3) \times 100\% = 33,33\%$

Target IKU ini di Triwulan III 2024= 30%

Capaian = (Realisasi / Target) x 100% = $(33,33\% / 30\%) \times 100\% = 111,11\%$

Dengan demikian, pada triwulan III 2024, Biro HKLN sukses memenuhi target Indikator Kinerja yang sebesar 30% sehingga capaiannya lebih besar daripada 100%. Jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 untuk pelaksanaan Indikator Kinerja ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan meskipun terjadi peningkatan atas realisasi maupun capaian.

Raw data atau data dukung serta informasi terkait dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional triwulan III 2024 dapat diakses melalui tautan <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WgqoPZeHGVrR3JhXw4Tl4lLaqLRBNeH9edlyfyw7J0w/edit?gid=0#gid=0> sheet 'IK Ketuanrumahan'. Tidak bisa dilakukan komparasi dengan target jangka menengah untuk Indikator Kinerja ini karena tidak tersedia besaran pembandingnya. Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan analisis melalui perbandingan. Pencapaian target IKK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN.

IK 10 Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	100%	n.a.	Belum

Tabel 22 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Sebagaimana tercantum dalam di atas, untuk triwulan III tahun 2024 belum ada hasil realisasi dari pengukuran IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Begitu juga dengan capaiannya karena selain belum adanya realisasi untuk IKK ini juga tidak ada target yang ditetapkan untuk triwulan yang sama.

Pengukuran IK ini bersifat tahunan, sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini yang menjelaskan di triwulan III tahun 2023 juga tidak ada realisasi untuk Indikator Kinerja yang sama. Meskipun belum ada realisasi dan capaian karena merupakan IKU tahunan, dalam laporan ini tetap disampaikan kondisi agar Biro HKLN dapat menyelesaikan laporan temuan BPK yang mungkin baru muncul di triwulan IV tahun 2024.

IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	100%	n.a.	n.a.

Tabel 24 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja ini belum tersedia di Triwulan III tahun 2024. Demikian juga dengan targetnya, sehingga capaian IKK ini di triwulan III 2024 belum dapat dihitung. Hal yang serupa berlaku dengan kondisi di triwulan III tahun 2023 karena penghitungan Indikator Kinerja ini bersifat tahunan.

Oleh karena semakin mendekatnya waktu pelaksanaan pengukuran Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Biro Perencanaan, maka pada triwulan-triwulan berikutnya di tahun 2023 dapat direkomendasikan dan dilaksanakan pengintensifan koordinasi internal Biro HKLN dalam rangka melakukan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan dengan berkoordinasi serta menjalin kerja sama yang baik dengan Biro Perencanaan dan bersinergi dengan semua pihak dalam menyediakan solusi apabila ditemukan isu dan masalah yang menghambat proses bisnis pencapaian target kinerja ini.

IK 12 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
IK bersifat semesteran	IK bersifat semesteran	IK bersifat semesteran	IK bersifat semesteran	IK bersifat semesteran	IK bersifat semesteran	76	n.a.	-

Tabel 26 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	72	65,16

Tabel 27 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Nilai Indeks Profesionalitas ASN di KKP diungkapkan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi secara berkala yaitu setiap semester. Sesuai dengan yang tersaji dalam tabel di atas, realisasi dan capaian IKK ini berdasarkan pemberitahuan resmi dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Biro SDMAOP KKP) untuk Biro HKLN pada Triwulan III 2023 adalah tidak tersedia. Target Indikator Kinerja ini untuk Triwulan III 2023 juga tidak ada sehingga tidak bisa dilakukan pengukuran capaiannya. Pengukuran IP ASN KKP yang dilakukan secara mandiri dengan pengambilan data yaitu

1. Kualifikasi/Tingkat Pendidikan dan Jenjang Jabatan dari Aplikasi e-Pegawai KKP;
2. Kompetensi (Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat Teknis 20 JP dan Seminar) dari Aplikasi SIASN BKN;
3. Kinerja atau SKP dari Aplikasi SIASN BKN dan Aplikasi Kinerja BKN; dan
4. Displin atau SK Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Aplikasi e-Pegawai KKP.

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, kondisi yang serupa juga ditemukan pada periode triwulan III tahun tersebut dimana tidak ada realisasi untuk Indikator Kinerja yang sama serta tidak ada target Indikator Kinerja yang ditetapkan pada periode yang sama.

Tidak ada standar nasional yang bisa dirujuk Biro HKLN sebagai pembanding dalam kinerja Indeks Profesionalitas ASN.

IK 13 Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
94%	133%	120,00%	92%	133%	120%	100%	n.a.	133%

Tabel 28 Realisasi dan Capaian IK Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan III 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	133%	120%

Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Target, realisasi dan capaian atas IK Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada triwulan III tahun 2024 dan progress kinerja IKK ini jika dibandingkan dengan perolehan kinerja di tahun sebelumnya (triwulan III tahun 2023) dapat dilihat pada kedua tabel di atas. Berdasarkan arahan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal yang merupakan penanggung jawab penghitungan IK ini di KKP, untuk triwulan III tahun 2024 ditetapkan targetnya sebesar 94%. Hasil penghitungan yang diumumkan oleh Pusdatin, Biro HKLN mendapatkan realisasi sebesar 133%. Dengan realisasi tersebut maka capaian dihitung oleh aplikasi kinerjaku menjadi 120,00%. Hal ini berarti bahwa kinerja Biro HKLN melampaui target Triwulan III tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, target renstra untuk indikator kinerja ini adalah 100% dan jika mengacu kepada target tersebut, Biro HKLN telah memenuhinya. Adapun faktor utama keberhasilan Biro HKLN memenuhi target Indikator Kinerja ini adalah koordinasi yang lebih baik dan terdapatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro HKLN, unit kerja baik di lingkup Setjen maupun oleh unit kerja lain lingkup KKP dan juga undangan dari stakeholder lainnya yang telah dihadiri oleh pimpinan Biro HKLN.

IK Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tidak memiliki standar nasional. Perolehan realisasi dan capaian Biro HKLN untuk nilai IK ini pada tahun triwulan III 2024 di lingkup Sekretariat Jenderal dapat memberikan nilai tambah untuk terus mencapai target yang lebih tinggi dari nilai sebelumnya.

IK 14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
100%	100%	100%	75%	75%	100%	80%	n.a.	120%

Tabel 30 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	75%	75%

Tabel 31 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada Triwulan III tahun 2024 adalah 100%. Target di triwulan III tahun 2024 untuk indikator kinerja ini adalah 100% maka capaian IK ini di triwulan III tahun 2024 menjadi 100%. Hal yang serupa berlaku pada periode triwulan III tahun 2023 dimana realisasi indikator kinerja yang sama adalah 75% dengan target sebesar 75% sehingga besar capaiannya adalah 100%. Target indikator kinerja ini di tahun terakhir yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah 80% sehingga realisasi/target Renstra untuk Indikator Kinerja sebesar 120%.

Realisasi indikator kinerja ini adalah berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditujukan kepada seluruh Unit Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal tertanggal 9 Oktober 2024. Dalam memorandum tersebut disampaikan terdapat 12 rekomendasi untuk Biro HKLN pada Triwulan III tahun 2024 dan 12 rekomendasi tersebut telah tuntas ditindak lanjut sehingga persentase rekomendasi sebesar 100%.

IK 15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan III 2024			Triwulan III 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	100%	n.a.	n.a.

Tabel 32 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Triwulan III 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 33 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kedua tabel di atas, tidak ada ketetapan untuk besar target Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN pada periode Triwulan III 2024. Namun, informasi terkait besar penyerapan anggaran sampai akhir Triwulan III 2024 yang bisa disampaikan dalam laporan ini secara garis besar terangkum dalam matriks di bawah ini, sehingga bisa diketahui kalau penyerapan oleh Biro HKLN adalah 59,34 %

Kelompok Kerja	Pagu	Realisasi Jan - Sep	% Realisasi Jan - Sep
Layanan Kerja Sama Bilateral	3.300.000.000	2.298.612.249	69,65
Layanan Kerja Sama Multilateral	4.200.000.000	1.462.505.661	34,82
Layanan Pemberitaan dan Opini Publik	2.668.241.000	2.030.581.946	76,10
Layanan Informasi Publik	795 877 000	631 088 798	79,29
Layanan Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	604 024 000	238 755 437	39,53
Layanan Umum	10.079.156.000	6 067.075 264	60,19
Layanan Operasional Perkantoran	4.187.550.000	2.620.947.429	62,59
Video Dokumenter	5.040.998.000	2.898.433.500	57,50
Modal Lainnya	222.112.000	205.720.700	92,62
Jumlah	31.097.958.000	18 453 720.984	59,34

Sesuai dengan target penyerapan, bahwa sampai dengan triwulan III pencapaian realisasi anggaran seharusnya mencapai 75%, namun baru mencapai 59,34%. Hal ini disebabkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang menurut jadwal akan dilaksanakan pada triwulan IV, sehingga nantinya realisasi pada akhir triwulan IV akan mencapai target sebesar 95% bahkan diprediksi akan mencapai 98%.

Langkah konkrit lainnya adalah terus melakukan pemantauan realisasi setiap minggu untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana untuk dilakukan percepatan.

IK 16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
100 %	100%	100%	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 34 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 35 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan III Tahun 2017 s.d. 2023

Target, realisasi dan capaian atas IK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada triwulan III tahun 2024 adalah 100 %. Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Langkah yang telah dilakukan sehingga penyusunan peraturrn dapat terselesaikan sesuai dengan target waktu adalah secara intens melakukan koordinasi dengan unit kerja eselon I lainnya lingkup KKP serta adanya koordinasi dengan Biro Hukum KKP yang merupakan unit kerja penanggungjawab perihal prosun peraturan perundang-undangan lingkup KKP.

IK 17 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Mendapatkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Triwulan III 2024			Triwulan III 2023			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	IK bersifat tahunan	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 36 Realisasi dan Capaian IKK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Triwulan III 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Tabel 37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tw III 2017 s.d. 2023

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan III tahun 2024, belum tersedia baik realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk Indikator Kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini dikarenakan penghitungan IK bersifat tahunan. Demikian juga dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, belum ada hasil penghitungan Indikator Kinerja ini karena hasilnya baru muncul di akhir tahun 2023. Berdasarkan peraturan terkait, belum tersedia target tahun terakhir pada rencana strategis untuk IK ini. Pada tataran nasional tidak tersedia standar dapat diacu Biro HKLN sebagai pembandingan atau sebagai rujukan. Tidak ada laporan bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia. Kegiatan yang dirampungkan pada triwulan III 2024 diantaranya adalah:

1. Mendapatkan wejangan dari para pakar WBK dari Inspektorat Jenderal;
2. Melakukan rapat terkait dengan WBK; dan
3. Menyediakan dokumen-dokumen yang diminta para pakar WBK dari Inspektorat Jenderal.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari 17 Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2024, Indikator Kinerja yang telah memiliki realisasi pada periode triwulan III 2024 adalah sebagai berikut (dilengkapi kode IKU berdasarkan aplikasi kinerjaku):
 - a. IKS.04, Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan, realisasinya sebesar 97,42%. Target IK ini adalah 89% maka capaiannya menjadi 109,46%;
 - b. IKS.05, Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, realisasi IKU sebesar 89,39% dengan besar target yaitu 88%. Oleh karena itu capaian IK berdasarkan penghitungan matematis adalah 101,58%;
 - c. IKS.06, Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti, target 55%, realisasi 82,35% maka realisasi berdasarkan aplikasi kinerjaku menjadi 120%;
 - d. IKS.07, Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, target IK ini adalah 88% sementara realisasi IK mencapai angka 90% sehingga capaiannya adalah 102,27%;
 - e. IKS.08, Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional, target 55%, realisasi 51,42%. Capaian IK ini berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku adalah 93,49%;
 - f. IKS.09, Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan. Besar target yaitu 30% dan realisasinya 33,33%. Oleh karena itu capaian IK berdasarkan penghitungan matematis adalah 111,10%;
 - g. IKS.13, Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, realisasinya sebesar 133%. Dengan target IKU sebesar 94% maka aplikasi kinerjaku menghitung capaian untuk IK ini sebesar 120%, dan
 - h. IKS.16, Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dengan realisasi sebesar 100 %. Target IKU ini untuk dipenuhi adalah 100% sehingga capaiannya menjadi 100%.
2. Pemenuhan target Indikator Kinerja Biro HKLN di triwulan III 2024 diyakini telah melalui pendayagunaan anggaran melalui penyerapan APBN KKP yang dialokasikan untuk Biro HKLN dengan seefektif dan seefisien mungkin.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Prabowo
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Ari Prabowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (nilai)	96,9
		2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (nilai)	93,3
		3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	94
		4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (persen)	89
		5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	88
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (persen)	95
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (persen)	93
		8	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP (persen)	88
		9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (persen)	100
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	84
		11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Indeks)	85
		12	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
		13	Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
		15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	95
		16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (persen)	100
		17	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	75

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	7.500.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	29.986.550.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024		37.486.550.000

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri



Ari Prabowo

Penghargaan yang diterima Biro HKLN pada Triwulan III 2024

